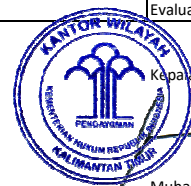


Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA. 2025
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Kantor Wilayah Kalimantan Timur

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran	Rencana Aksi (adalah kegiatan yang selama ini menjadi permasalahan krusial dalam rangka pencapaian target output, dan sebagai upaya kualitas output sehingga berdampak bagi peningkatan kinerja organisasi)		Timeline Renaksi (Triwulan I/II/III/IV)
A	Bagian Umum dan TU							
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	Rp 24.120.441.000	1. Perencanaan dan Organisasi	Melakukan Penyusunan Rencana Strategis Kanwil Melakukan Monitoring Capaian RO pada setiap DIPA Sinkronisasi Laporan target CRO dengan Penginputan Melakukan Monitoring Alokasi Anggaran sesuai Melakukan penyusunan SAKIP dan LKjIP sesuai Menyusun dan kompilasi Manajemen Risiko Kanwil Menyusun dan kompilasi SPIP Kanwil Kementerian	III dan IV I, II, III, dan IV I, II, III, dan IV I, II, III, dan IV II dan IV II IV
						2. Keuangan	Melakukan monitoring pengendalian revisi DIPA pagu Monitoring akurasi / ketepatan realisasi pencairan Monitoring akselerasi belanja berdasarkan target Monitoring ketepatan waktu pertanggungjawaban Monitoring akselerasi pencapaian output berkualitas. Monitoring pengelolaan rekening pemerintah berupa Monitoring sertifikasi pengelola keuangan. Melakukan rekonsiliasi data laporan keuangan.	I, II, III, dan IV I, II, III, dan IV I, II, III, dan IV I, II, III, dan IV I, II, III, dan IV I, II, III, dan IV I, II, III, dan IV II dan IV
						3. Pengelolaan BMN	Melakukan penyusunan Wasdal Semester II Tahun Melakukan penghapusan terhadap aset yang telah Melakukan penyusunan RKBMN Tahun 2024 aplikasi Melakukan inventarisasi BMN pada setiap bagian dan	I dan III III dan IV II dan III III dan IV
						4. Kepegawaian/SDM	Sosialisasi penegakan disiplin pegawai Pelaksanaan ujian kedinasan dan Penyesuaian ijazah Terlaksananya penyusunan kebutuhan pegawai Pengembangan kompetensi pegawai melalui Pelaksanaan surat menyurat melalui aplikasi Laporan LHKSN SERAYA dan pelaporan SPT Tahunan	I II I, II, III, dan IV I, II, III, dan IV I, II, III, dan IV I
						5. Humas	Peliputan kegiatan Kehumasan di wilayah Publikasi pada media cetak dan online Layanan koordinasi dan pelaksanaan keprotokoleran	I, II, III, dan IV I, II, III, dan IV I, II, III, dan IV
						6. Teknologi Informasi	Evaluasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan kantor Melakukan pemeliharaan sistem dan jaringan di	I, II, III, dan IV I, II, III, dan IV
						7. Rumah Tangga	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana berupa peralatan Pemeliharaan Halaman Kantor Penataan ulang Sarana pendukung Aula Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Pembelian Kebutuhan perlengkapan Kerumah Pembagian dan penjadwalan kembali petugas	I, II, III, dan IV I, II, III, dan IV I II, III I, II, III, dan IV I
						8. Reformasi Birokrasi	Pembentukan satker WBK/WBBM Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan Melaksanakan pembangunan budaya anti korupsi	I, II, III, dan IV I, II, III, dan IV I, II, III, dan IV

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran	Rencana Aksi (adalah kegiatan yang selama ini menjadi permasalahan krusial dalam rangka pencapaian target output, dan sebagai upaya kualitas output sehingga berdampak bagi peningkatan kinerja organisasi)	Timeline Renaksi (Triwulan I/II/III/IV)					
B	Divisi Pembentukan Regulasi											
1	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	Rp 491.370.000	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Persiapan harmonisasi rancangan produk hukum daerah	I				
							Pelaksanaan harmonisasi rancangan produk hukum	I, II, III, dan IV				
							Pelaksanaan fasilitasi rancangan produk hukum	I, II, III, dan IV				
							Persiapan pemantauan dan evaluasi rancangan	I				
		Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11 Orang	Rp 201.630.000		Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rancangan	I, II, III, dan IV				
							Pelaporan pemantauan dan evaluasi rancangan	IV				
2	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	Rp 63.598.000	Analisis Hukum	Persiapan analisis dan evaluasi hukum	I				
							Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum	I, II, III, dan IV				
							Perumusan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi	III dan IV				
							Peningkatan pemahaman analisis dan evaluasi	II, III, dan IV				
			2. Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Rp 70.044.000	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Fasilitas penyusunan naskah akademik	I, II, III, dan IV				
							Fasilitas penyusunan perencanaan pembentukan	I, II, III, dan IV				
3	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	Rp 84.127.000	JDIH	Pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah	I, II, III, dan IV				
							Promosi, penerbitan dan kerja sama JDIH di wilayah	I, II, III, dan IV				
							Pengelolaan perpustakaan hukum	I, II, III, dan IV				
							Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan	I, II, III, dan IV				
		Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total	82%	Rp 1.464.000.000	Bantuan Hukum	Pemeriksaan dan upaya hukum biasa	I, II, III, dan IV				
							Upaya hukum luar biasa	I, II, III, dan IV				
							2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non	80%	Rp 234.740.000	Bantuan Hukum	Penyebarnya informasi dan penanganan perkara di luar pengadilan	I, II, III, dan IV
											Konseling	I, II, III, dan IV
		Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	Rp 368.711.000	Penyuluh Hukum	Kegiatan penyuluhan hukum di daerah	I, II, III, dan IV				
							Pembinaan desa/kelurahan sadar hukum	I, II, III, dan IV				
							Penyelenggaraan Paralegal Justice Award di wilayah	I, II, III, dan IV				
							Pembinaan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	I, II, III, dan IV				
4	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Rp 272.177.000	BSK	Inventarisasi permasalahan hukum di wilayah	I, II, III, dan IV				
							Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar	I, II, III, dan IV				
							Persiapan sosialisasi diskusi strategi kebijakan hukum	I				
							Pelaksanaan sosialisasi diskusi strategi kebijakan	I, II, III, dan IV				
							Pelaporan sosialisasi diskusi strategi kebijakan hukum	IV				
							Analisis strategi kebijakan hukum	IV				

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran	Rencana Aksi (adalah kegiatan yang selama ini menjadi permasalahan krusial dalam rangka pencapaian target output, dan sebagai upaya kualitas output sehingga berdampak bagi peningkatan kinerja organisasi)		Timeline Renaksi (Triwulan I/II/III/IV)
C	Divisi Pelayanan Hukum							
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Rp 1.954.881.000	Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	Pelayanan kewarganegaraan	I, II, III, dan IV
							Pelantikan PPNS	I, II, III, dan IV
							Pelantikan notaris	I, II, III, dan IV
							Pelayanan AHU lainnya	I, II, III, dan IV
							Migrasi data layanan AHU	I, II, III, dan IV
							Sosialisasi/diseminasi/FGD/Rakor/Seminar/Webinar/	I, II, III, dan IV
							Kegiatan publikasi, pameran dan helpdesk	I, II, III, dan IV
							Koordinasi layanan AHU di wilayah	I, II, III, dan IV
							Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi layanan AHU	I, II, III, dan IV
							Pelaporan pemantauan dan evaluasi layanan AHU di	IV
		Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	Rp 1.675.119.000		Dukungan kesekretariatan dan pengawasan MPW	I, II, III, dan IV
							Dukungan kesekretariatan dan pengawasan MPD	I, II, III, dan IV
							Dukungan kesekretariatan dan pengawasan MKNW	I, II, III, dan IV
2	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di	30%	Rp 213.839.000	Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	Pengawasan Hak KI di wilayah	I, II, III, dan IV
							Pendampingan penanganan aduan/pelanggaran KI di	I, II, III, dan IV
							Persiapan diseminasi dan edukasi KI di wilayah	I
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	Rp 633.201.000		Pelaksanaan diseminasi dan edukasi KI di wilayah	I, II, III, dan IV
							Evaluasi dan pelaporan diseminasi dan edukasi KI di	IV
							Pelaksanaan pencegahan pelanggaran hak KI	I, II, III, dan IV
			2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	Rp 715.324.000		Pendampingan pengajuan permohonan KI di wilayah	I, II, III, dan IV
							Evaluasi dan pelaporan layanan KI di wilayah	IV



Kepala Kantor Wilayah;

Muhammad Ikmal Idrus